

PANCASILA SEBAGAI DASAR ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

Carissa Theona Natali Aritonang¹, Ayuni Safitri², Nian Kristiani Zagoto³, Sarfina Zahra⁴, Sri Yunita⁵

Universitas Negeri Medan

Email: carissarisa212@gmail.com¹, ayunisafitri@unimed.ac.id², nianzgt@gmail.com³, finasazhra@gmail.com⁴, sr.yunita@unimed.ac.id⁵

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai landasan politik dan hukum, tetapi juga sebagai kerangka etika yang relevan dalam bidang kesehatan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar etika dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan kesehatan masyarakat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review) dengan menelaah artikel-artikel ilmiah nasional yang membahas keterkaitan Pancasila dengan etika dan pelayanan kesehatan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa kelima sila Pancasila memiliki relevansi langsung terhadap prinsip-prinsip etika kesehatan masyarakat, meliputi penghormatan terhadap keyakinan pasien (sila pertama), perlakuan yang adil dan manusiawi (sila kedua), semangat gotong royong dan solidaritas dalam pelayanan (sila ketiga), musyawarah dalam pengambilan keputusan kebijakan kesehatan (sila keempat), serta pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat (sila kelima). Implementasi nilai-nilai tersebut tampak dalam kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan akses, minimnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap nilai Pancasila, dan lemahnya pengawasan etika pelayanan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu terus dilakukan melalui pendidikan profesi kesehatan dan penguatan kebijakan publik agar tercipta sistem kesehatan yang adil, merata, dan berkeadaban.

Kata Kunci: Pancasila, Etika Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Kebijakan Kesehatan, Tinjauan Literatur.

ABSTRACT

Pancasila, as the foundational philosophy of the Indonesian state, functions not only as a political and legal basis but also as an ethical framework relevant to public health. This article aims to examine how the values of Pancasila can serve as an ethical foundation for public health services and policy in Indonesia. A literature review method was employed by analyzing national scientific articles discussing the relationship between Pancasila and health ethics. The review shows that the five principles of Pancasila are directly relevant to public health ethics, including respect for patients' beliefs, fair and humane treatment, solidarity in service delivery, deliberation in health policy decision-making, and equitable access to health services. These values are reflected in Indonesia's National Health Insurance (JKN) policy through BPJS Kesehatan, although implementation still faces challenges such as unequal access, limited understanding of Pancasila values among health workers, and weak ethical oversight. This article concludes that continuous internalization of Pancasila values is needed through health profession education and stronger public policy to achieve a fair, equitable, and civilized health system.

Keywords: Pancasila, Health Ethics, Public Health, Health Policy, Literature Review.

A. PENDAHULUAN

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Sebagai dasar negara, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum sekaligus pandangan hidup yang mengikat seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat (Husni et al., 2024).

Kesehatan masyarakat merupakan bidang yang sarat dengan persoalan etis, mulai dari relasi antara tenaga kesehatan dan pasien, distribusi sumber daya kesehatan yang terbatas, hingga perumusan kebijakan kesehatan yang berdampak luas pada masyarakat. Dalam konteks tersebut, etika kesehatan tidak dapat berdiri sendiri sebagai konsep universal yang lepas dari konteks sosial-budaya suatu bangsa, melainkan perlu berpijak pada nilai-nilai yang hidup dan diyakini bersama oleh masyarakatnya (Farra et al., 2024).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—memiliki relevansi langsung dengan prinsip-prinsip etika pelayanan kesehatan, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan dalam akses layanan, dan tanggung jawab moral tenaga kesehatan (Olivia, 2021; Romadoni et al., 2024). Namun demikian, penerapan nilai-nilai tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan akses layanan kesehatan antarwilayah hingga lunturnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap nilai-nilai kebangsaan (Maharani et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun sebagai tinjauan literatur (literature review) yang bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diposisikan sebagai dasar etika dalam pelayanan dan kebijakan kesehatan masyarakat di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode studi kepustakaan (library research/literature review), yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik kajian, tanpa melibatkan pengumpulan data primer di lapangan. Penelusuran literatur dilakukan terhadap artikel jurnal nasional terakreditasi maupun non-terakreditasi yang membahas keterkaitan Pancasila dengan etika kesehatan, pelayanan kesehatan, dan kebijakan kesehatan masyarakat, yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2021–2025.

Sumber yang digunakan diperoleh melalui basis data jurnal ilmiah daring (Google Scholar dan portal OJS jurnal nasional) dengan kata kunci "Pancasila dan etika kesehatan", "Pancasila dan pelayanan kesehatan", serta "Pancasila dan kebijakan kesehatan masyarakat". Artikel yang terpilih kemudian ditelaah secara deskriptif-kualitatif dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, membandingkan temuan antarartikel, dan menyintesiskannya ke dalam kerangka pembahasan yang runtut berdasarkan kelima sila Pancasila.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pancasila sebagai Kerangka Etika Kesehatan

Etika secara umum dipahami sebagai cabang ilmu yang membahas nilai dan norma yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika dikaitkan dengan Pancasila, muncul konsep "Etika Pancasila", yaitu sistem moral yang bersumber dari kelima sila dan digunakan untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti kesehatan (Husni et al., 2024). Berbeda dengan

kerangka etika kesehatan global yang umumnya bertumpu pada empat prinsip bioetika (otonomi, beneficence, non-maleficence, dan keadilan), Etika Pancasila menempatkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

2. Relevansi Kelima Sila terhadap Etika Pelayanan Kesehatan

Kajian dari beberapa artikel menunjukkan bahwa setiap sila Pancasila memiliki titik temu langsung dengan praktik dan kebijakan kesehatan masyarakat, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1 berikut.

Sila	Nilai Dasar	Relevansi dengan Etika Kesehatan Masyarakat
I	Ketuhanan Yang Maha Esa	Pelayanan kesehatan diberikan tanpa membedakan latar belakang agama dan keyakinan pasien; tenaga kesehatan menjunjung integritas moral dalam menjalankan tugas (Husni et al., 2024).
II	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan menjunjung martabat manusia bagi seluruh pasien tanpa memandang status sosial-ekonomi (Olivia, 2021).
III	Persatuan Indonesia	Semangat gotong royong dan solidaritas lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan demi kepentingan bersama (Farra et al., 2024).
IV	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	Musyawarah dan tanggung jawab moral dalam pengambilan keputusan kebijakan kesehatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas (Husni et al., 2024).
V	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Pemerataan akses dan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sebagaimana diwujudkan melalui program JKN-BPJS Kesehatan (Rahmatullah et al., 2025; Tiba et al., 2025).

Tabel 1. Relevansi Sila Pancasila terhadap Etika Kesehatan Masyarakat (diolah dari Husni et al., 2024; Olivia, 2021; Farra et al., 2024; Rahmatullah et al., 2025; Tiba et al., 2025)

Sila pertama menuntut agar pelayanan kesehatan diselenggarakan tanpa membedakan pasien berdasarkan agama atau keyakinan, sekaligus menjadi landasan spiritual bagi tenaga kesehatan untuk bekerja dengan penuh integritas (Husni et al., 2024). Sila kedua menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dan manusiawi, mengingat masih ditemukannya praktik diskriminatif seperti penelantaran pasien tidak mampu atau perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial-ekonomi (Husni et al., 2024; Olivia, 2021).

Sila ketiga menekankan solidaritas dan gotong royong lintas sektor, yang tercermin dalam kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang menjangkau seluruh lapisan, termasuk daerah terpencil (Farra et al., 2024). Sila keempat menggarisbawahi pentingnya musyawarah dan tanggung jawab moral dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan kesehatan, terutama yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih partisipatif dan legitimate (Husni et

al., 2024).

Sila kelima menjadi sila yang paling banyak disorot dalam kajian mengenai kesehatan masyarakat, karena berkaitan langsung dengan pemerataan akses dan keadilan distribusi layanan kesehatan. Implementasi konkretnya dapat dilihat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, yang dirancang untuk menjamin bahwa layanan kesehatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, tetapi merata bagi seluruh rakyat Indonesia (Rahmatullah et al., 2025; Tiba et al., 2025).

3. Implementasi dalam Kebijakan dan Praktik Kesehatan Nasional

Pada tataran kebijakan, nilai-nilai Pancasila secara eksplisit maupun implisit telah diintegrasikan ke dalam berbagai program kesehatan nasional. Program JKN-BPJS Kesehatan merupakan salah satu wujud konkret dari sila kelima, yang bertujuan menjamin akses layanan kesehatan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang status ekonomi maupun wilayah tempat tinggal (Pattipeilohy et al., 2023; Rahmatullah et al., 2025). Selain itu, nilai kerakyatan dan musyawarah turut tercermin dalam mekanisme perumusan kebijakan kesehatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi, serta masyarakat sipil (Romadoni et al., 2024).

Pada tataran praktik pelayanan, nilai kemanusiaan dan persatuan menjadi acuan moral bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya, misalnya melalui sikap tidak diskriminatif, kesediaan memberikan pelayanan hingga ke daerah terpencil, serta menjaga kerahasiaan dan martabat pasien (Olivia, 2021; Farra et al., 2024). Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di bidang kesehatan.

4. Tantangan dalam Penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Bidang Kesehatan

Meskipun secara konseptual nilai-nilai Pancasila sangat relevan dengan etika kesehatan masyarakat, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih ditemukan kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan maupun antarkelompok sosial-ekonomi, yang bertentangan dengan semangat keadilan sosial pada sila kelima (Maharani et al., 2024; Tiba et al., 2025). Kedua, pemahaman tenaga kesehatan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika profesi belum sepenuhnya merata, sehingga diperlukan penguatan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (Maharani et al., 2024).

Ketiga, implementasi kebijakan seperti JKN-BPJS Kesehatan masih menghadapi kendala teknis dan administratif, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana pelayanan, dan sosialisasi program kepada masyarakat, yang berpotensi menghambat pemenuhan prinsip keadilan sosial secara menyeluruh (Rahmatullah et al., 2025). Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam bidang kesehatan bukan sekadar wacana normatif, melainkan memerlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pembuat kebijakan hingga tenaga kesehatan di garis depan pelayanan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki relevansi yang kuat sebagai dasar etika dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kelima sila Pancasila—ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial—masing-masing memberikan pedoman moral yang relevan bagi tenaga kesehatan maupun pembuat kebijakan, mulai dari penghormatan terhadap keyakinan pasien, perlakuan yang adil dan manusiawi, solidaritas dalam pelayanan, musyawarah dalam pengambilan keputusan, hingga pemerataan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Implementasi nilai-nilai tersebut telah tercermin dalam berbagai kebijakan kesehatan nasional, khususnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan sebagai wujud konkret dari sila keadilan sosial. Namun demikian, penerapannya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses layanan, minimnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap nilai-nilai Pancasila, serta kendala teknis dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan melalui pendidikan profesi kesehatan, penguatan regulasi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan, agar sistem kesehatan masyarakat Indonesia dapat terwujud secara adil, merata, dan berkeadaban sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila

DAFTAR PUSTAKA

- Farra, A., Ayu, C., Larasati, D., Setya, F., Virantika, L., & Yulia, S. (2024). Pancasila sebagai pilar kesehatan masyarakat dalam membangun kesadaran dan aksi berbasis nilai-nilai luhur. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 1(2), 112–117.
- Husni, A. N., Amalia, A., Munatunnisa, H., Saputri, N. W., & Widyaningsih, S. (2024). Pancasila sebagai fondasi etika dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 101–107. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.136>
- Maharani, A. B., Ramadhani, A. S., Shahnaz, H., Favela, K. N., Alfarizy, N. W., Wachdin, Q. A., & Hadi, S. (2024). Membumikan Pancasila di dunia kesehatan: Hambatan dan tantangannya. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(4), 199–209.
- Olivia, L. (2021). Implementasi nilai Pancasila sebagai sumber etika, moral dan karakter dalam penerapan pelayanan kesehatan keperawatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(2), 113–121.
- Pattipeilohy, L., Saingo, Y. A., Kristen, A., & Kupang, N. (2023). Pancasila sebagai dasar sistem kesejahteraan masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), 355–360.
- Rahmatullah, L. M., Yustitia, N. T., Nulandari, H. P., Utari, W. S., Putri, H. P., & Widyananda, D. (2025). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan pelayanan kesehatan nasional. *Journal of Social and Education*, 2(1).
- Romadoni, R. N., Purwaningtyas, L., Anggraini, N., Ramadani, L., & Santoso, A. P. A. (2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan administrasi kesehatan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 89–93.
- Tiba, Y. P., Saingo, Y. A., & Suardana, I. M. (2025). Signifikansi nilai-nilai Pancasila pada sila ke lima bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 405–417.